

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH
SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

FENDIKA SETYA ADI

C100140109

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU
MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

FENDIKA SETYA ADI
C100140109

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU
MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Yang ditulis oleh :

FENDIKA SETYA ADI
C100140109

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Kamis, 11 Oktober 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Inayah, S.H, M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono S.H, M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Ali Mukti, S.H,M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S. H., M. Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 03 Oktober 2018

Penulis



Fendika Setya Adi
C100 140 109

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak pasien peserta BPJS kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengetahui kendala serta upaya rumah sakit dalam melaksanakan program pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dimana data penelitian diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan direktur keuangan rumah sakit yang mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya masyarakat belum mengerti bahwa mereka memiliki hak hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hasil penelitian menunjukan bahwa rumah sakit PKU Muhammadiyah telah melaksanakan sebagian besar program pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2014 namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti Awamnya masyarakat mengenai alur prosedur pelayanan kesehatan BPJS dan kurangnya sarana dan prasarana di rumah sakit yang menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan menjadi tidak optimal. rumah sakit PKU Muhammadiyah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut seperti melakukan pemasangan bagan yang dapat dilihat pasien peserta BPJS Kesehatan dan melakukan rujukan ke rumah sakit lain yang memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan pasien sesuai dengan sistem rujukan yang diatur oleh undang-undang. Dengan upaya tersebut diharapkan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS kesehatan dapat diberikan secara optimal.

Kata Kunci : perlindungan, pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan

Abstract

This study aims to determine the implementation of legal protection related to the rights of patients of BPJS health participants in obtaining health services and knowing the constraints and efforts of the hospital in implementing health services BPJS Health in PKU Muhammadiyah Surakarta hospital. The research method used is a descriptive empirical juridical method where the research data was obtained directly through interviews with the hospital's finance director who supervised the implementation of health services in PKU Muhammadiyah Surakarta hospital. The background of this study is that many people do not understand that they have rights The regulation stipulated in the legislation shows that PKU Muhammadiyah hospital has implemented most health service programs in accordance with Health BPJS Regulation No. 1 of 2014 and Health Minister Regulation No. 71 of 2014 but in its implementation there are still obstacles such as public awareness regarding the flow BPJS health service procedures and lack

of facilities and infrastructure in the hospital which caused the services provided to patients BPJS Health participants to be not optimal. PKU Muhammadiyah hospital made an effort to overcome This problem is like installing a chart that can be seen by patients of BPJS Health participants and referring to other hospitals that have the facilities and infrastructure needed by patients in accordance with the referral system regulated by law. With these efforts it is expected that the implementation of health services for health BPJS participants can be provided optimally.

Keyword : protection, health services, BPJS Health

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat indonesia yang pelaksanaanya wajib diselenggarakan oleh pemerintah yang tercantum pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Dan Pasal 34 ayat (3) *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”*

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.¹

BPJS dalam menjalankan programnya masih belum menuai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan dari pemerintah indonesia yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Fenomena yang berkembang di Indonesia saat ini adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat .Hal ini tidak saja terjadi di perkotaan namun juga merambah hingga pedesaan. Kesulitan pelayanan tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor

¹ Kementrian Kesehatan Republik Indonesia , *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional*, hal.41

finansial Banyak dijumpai di daerah-daerah di Indonesia masyarakat miskin yang menderita sakit parah atau penyakit tergolong berat tidak dapat disembuhkan karena ketiadaan biaya pengobatan sehingga pada akhirnya lambat ditangani atau tidak ditangani sama sekali sehingga pada akhirnya penyakitnya semakin parah bahkan mengakibatkan kematian. Kemudian faktor penyebab lainnya adalah sumber daya manusia yang relatif rendah yang menyebabkan keterbatasan informasi, misalnya tentang aturan hak dan kewajiban masyarakat sebagai pasien yang membutuhkan pelayanan medis agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan misalnya pelayanan dari tenaga medis yang tidak menyenangkan, malpraktik, dan lain sebagainya.²

Dalam penyelenggaraan sistem kesehatan yang dilakukan oleh BPJS terdapat 3 pihak yang saling terkait yaitu BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan, dan Fasilitas Kesehatan mitra BPJS kesehatan. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dari informasi yang telah diperoleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta merupakan Rumah Sakit Faskes BPJS yang menjalankan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak pasien peserta BPJS kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS. 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam menghadapi kendala yang timbul pada pelaksanaan pelayanan Kesehatan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah 1) Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek di lapangan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan

² Nora Eka Putri, 2014, *Efektifitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di kota Padang*, Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata yang lebih mendalam. Khususnya mengenai masalah pelaksanaan suatu hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan peserta BPJS. 2) Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta membantu penulis dalam kemampuannya untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris adalah yaitu untuk mengetahui pelaksanaan atau penerapan suatu peraturan perundang undangan atau suatu keputusan dari lembaga yang berwenang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan tertentu. Sumber data terdiri dari data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. kemudian data dianalisis dengan metode analisis deskriptif-kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terkait Hak-Hak Peserta BPJS Kesehatan Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan hukum dalam memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu dengan menjadikan suatu kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.³ Jadi dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap hak-hak yang berdasar pada suatu undang-undang .

³ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 357

Untuk mengetahui pelaksanaan suatu perlindungan hukum terkait dengan hak hak peserta BPJS perlu diketahui tingkat kepatuhan yang dilakukan rumah sakit terhadap regulasi yang berkaitan dengan hak hak yang dimiliki oleh peserta BPJS. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator seperti pemenuhan persyaratan, dan pemenuhan hak-hak terkait pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS. Indikator tersebut yaitu :

3.1.1 Pemenuhan Persyaratan

Untuk menjalin kerjasama atau menjadi bagian mitra dari BPJS kesehatan , Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta harus menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam perjanjian tersebut memuat syarat syarat yang mengatur baik pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta maupun dari pihak BPJS Kesehatan Surakarta. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber mengenai pemenuhan persyaratan tersebut RS PKU Muhammadiyah telah menjalankan regulasi yang di berikan oleh BPJS kesehatan terkait dengan persyaratan persyaratan yang ada. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam memenuhi syarat syarat yang telah di atur dalam regulasi yang berlaku hanya melanjutkan dari perjanjian kerjasama yang telah ada sebelumnya dengan PT.Askes ,apabila ada ketentuan baru mengenai persyaratan yang ada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah surakarta hanya tinggal menyesuaikan saja.

3.1.2 Pemenuhan Hak-Hak Terkait Pelayanan Kesehatan Terhadap Peserta BPJS Kesehatan

Pelaksanaan perlindungan hukum terkait hak-hak peserta BPJS sebenarnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 dan Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.71 th 2013 pasal 13 menyebutkan bahwa setiap peserta BPJS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif hal ini juga sejalan dengan peraturan BPJS no 1 th 2014 pasal 25 ayat (2).

Dalam hal ini Rumah Sakit PKU sebenarnya telah menjalankan seluruh pelayanan kesehatan yang ada seperti di atas namun untuk peserta BPJS Kesehatan berbeda, Rumah sakit PKU Muhammadiyah yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dimana fasilitas kesehatan tingkat lanjutan merupakan fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hanya menjalankan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif seperti pengobatan yang bertujuan untuk penyembuhan suatu penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin dan mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. untuk pelayanan promotif dan preventif seharusnya sudah di dapatkan pada faskes tingkat pertama.

Rumah sakit PKU Muhammadiyah surakarta merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang melayani pelayanan kesehatan tingkat ketiga (Subspesialistik). dalam melaksanakan program BPJS kesehatan terdapat jenis jenis pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang merupakan hak dari peserta BPJS , hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan no 71 tahun 2013 pasal 20

Administrasi pelayanan adalah pelayanan yang berkaitan dengan biaya administrasi yang dikeluarkan selama proses pelayanan kesehatan berlangsung pada fasilitas kesehatan tersebut. RS PKU Muhammadiyah untuk keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang di berikan kepada peserta BPJS mengacu pada PMK no 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. prosedur administrasi harus membawa surat rujukan dari faskes tingkat sebelumnya seperti puskesmas, dokter klinik, dokter keluarga, puskesmas, Rumah sakit tipe c atau d namun hal itu di kecualikan apabila dalam keadaan darurat

peserta BPJS yang merupakan pasien berhak untuk melakukan konsultasi, pemeriksaan, ataupun pengobatan mengenai masalah kesehatan yang di derita

oleh pasien kepada dokter spesialis sesuai indikasi medis pada faskes sebelumnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta merupakan rumah sakit kelas B yang hampir seluruh pelayanan medik spesialis maupun sub spesialis dimiliki oleh rumah sakit ini diantaranya Pelayanan Gawat darurat, Pelayanan Spesialis, pelayanan sub spesialis dan Pelayanan spesialisasi gigi dan mulut. Rumah sakit pku muhammadiyah memiliki tenaga dokter yang berjumlah sekitar 74 dokter baik dokter umum, spesialis maupun sub spesialis jumlah tersebut sudah cukup dalam pelaksanaan suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit dan sesuai dengan MK No 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit

Dalam pelayanan kesehatan dokter memiliki wewenang untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis hal ini di atur dalam UU no 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran

RS PKU muhammadiyah dalam memberikan tindakan medis kepada pasien harus berdasar pada diagnosis atau indikasi yang di tetapkan oleh dokter namun menurut Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dalam melaksanakan suatu tindakan medis dokter perlu menanyakan persetujuan kepada pasien dan pasien berhak menolak atas tindakan medis yang di berikan dari dokter tersebut

pelayanan obat berkaitan erat dengan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari sistem pelayanan di rumah sakit yang berorientasi pada pelayanan pasien, penyediaan obat bagi pasien rumah sakit.⁴

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta memberikan obat kepada pasien harus berdasar indikasi medis yang diberikan oleh dokter untuk jenis obat yang diberikan disesuaikan dengan besaran claim yang di atur dalam PMK No 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan JKN

pelayanan penunjang diagnostik merupakan bagian dari pelayanan penunjang medik. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah surakarta telah

⁴ Jeane Mongi, *Implementasi Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Angkatan Darat Robert Wolter Mongosidi Manado*, Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

memberikan pelayanan penunjang diagnostik baik kepada pasien umum maupun pasien peserta BPJS Kesehatan namun Rumah Sakit PKU Muhammadiyah tidak menjamin ketersediaan alat penunjang diagnostik tersebut apabila pasien dalam pemeriksaan membutuhkan alat penunjang diagnostik yang rumah sakit PKU Muhammadiyah tidak tersedia maka akan di buat rujukan ke Rumah Sakit lain

pelayanan darah adalah pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta akan tetap memberikan pelayanan darah bagi peserta BPJS kesehatan apabila dibutuhkan.

Di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta terdapat bank darah rumah sakit yang merupakan pelaksana dari pelayanan darah di rumah sakit dalam pelaksanaannya Bank darah Rumah Sakit bekerja sama dengan UTD PMI surakarta hal ini sejalan dengan apa yang di jelaskan pada PMK No 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah yang menerangkan bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki Bank Darah Rumah Sakit yang terintegrasi dengan pelayanan Unit Transfusi Darah

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang di berikan kepada pasien dilakukan apabila berdasar pada indikasi medis di buktikan dengan surat perintah rawat inap oleh dokter

terdapat 3 kelas yang merupakan ruangan rawat inap bagi peserta BPJS yaitu kelas I,II,dan III hal itu diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Rumah sakit PKU Muhammadiyah sendiri Memiliki 9 jenis maupun kelas ruang Rawat inap yang masing masing kelas memiliki perbedaan dalam hal fasilitas yang terdapat pada ruang rawat inap tersebut kelas tersebut diantaranya Ruang ICU-ICCU-HCU., Ruang PICU-NICU, Ruang Kelas Super VIP, Ruang Kelas VIP, Ruang Kelas Utama A, Ruang Kelas Utama B, Ruang Kelas I, Ruang Kelas II, Ruang Kelas III . Pelayanan kesehatan yang di berikan oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta kepada pasien rawat inap sebenarnya sama untuk

semua kelas namun yang membedakan adalah fasilitas ruang rawat inap berdasar kelas yang dimiliki oleh peserta BPJS Kesehatan.

3.2 Kendala yang Dihadapi Rumah Sakit dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan

Kendala yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sangat penting artinya untuk di ketahui karena dengan mengetahui berbagai kendala yang ada maka proses pelayanan kesehatan dapat diberikan secara maksimal⁵

Kurangnya informasi kepada pasien peserta BPJS Kesehatan terkait alur atau langkah dalam administrasi BPJS Kesehatan merupakan salah satu kendala yang hampir sering dialami oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah surakarta hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bpjs kesehatan

Kurangnya sarana dan prasarana, dokter sub spesialis, dan fasilitas kesehatan juga menjadi kendala yang hal tersebut sangat menghambat proses pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

Kendala yang paling berpengaruh adalah adanya batasan tarif pemeriksaan yang ditetapkan oleh PMK no 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan sehingga dokter tidak bisa dengan leluasa memberikan pelayanan kepada pasien secara maksimal karena adanya batasan tersebut.

3.3 Upaya -Upaya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dalam menghadapi Kendala yang Timbul pada Pelayanan Kesehatan

Upaya – upaya yang di lakukan Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta adalah untuk meminimalisir adanya kendala yang timbul saat pelaksanaan pelayanan kesehatan berlangsung.

Dalam rangka mengatasi kurangnya informasi yang diketahui oleh peserta BPJS Kesehatan, terkait langkah-langkah yang harus dilakukan agar, hak-hak

⁵ Muninjaya, A.A.Gede, 2004, Manajemen Kesehatan, Kedokteran ECG, Jakarta , hal.56

dari pasien peserta dapat dilayani dan dipenuhi adalah dengan memberikan informasi melalui pemasangan bagan atau alur pemeriksaan, dokumen yang harus dibawa oleh peserta guna mendapatkan pelayanan dari rumah sakit pada tempat yang terlihat dan mudah terbaca oleh pasien peserta.

Kendala mengenai kurangnya sarana prasarana, dokter, fasilitas kesehatan rumah sakit berupaya dengan melakukan rujukan sesuai dengan alur rujukan yang diatur dalam Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan PMK No 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, rujukan dilakukan dengan sistem horizontal dimana rumah sakit memberikan rujukan ke rumah sakit lain dalam satu tingkatan dengan alasan rumah sakit perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta adalah pelayanan tingkat ketiga dimana rumah sakit ini merupakan pelayanan kesehatan subspecialistik

Timbulnya kendala yang di hadapi adalah adanya pembatasan biaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan JKN yang berakibat pada jenis obat dan pelayanan penunjang diagnostik yang di berikan pada pasien peserta BPJS Kesehatan. Upaya Rumah sakit PKU dalam hal ini adalah dengan menyediakan dokter atau petugas pengendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan hal ini dilakukan untuk menjamin agar pelayanan kesehatan yang di berikan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan mutu yang di tetapkan dan diselenggarakan secara efisien.hal tersebut sesuai dengan Pasal 80 Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan BPJS Kesehatan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

pertama Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan peserta BPJS dilindungi oleh Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 Dan Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013. Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun

2013 pasal 13 menyebutkan bahwa setiap peserta BPJS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah merupakan rumah sakit fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang dalam hal ini menjalankan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif seperti pengobatan yang bertujuan untuk penyembuhan suatu penyakit dan mengembalikan kesehatan pasien seperti sedia kala sehingga dapat kembali kedalam masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 pasal 20 juga diatur mengenai hak hak yang di peroleh peserta terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Rumah sakit PKU Muhammadiyah dalam hal ini telah melaksanakan sebagian besar jenis-jenis pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. namun dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala kendala yang menyebabkan pelaksanaan program pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan yang diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 menjadi tidak optimal

Kedua kendala yang dialami rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta antara lain banyaknya pasien peserta BPJS Kesehatan yang belum memahami prosedur dalam pelaksanaan pelayanan bagi peserta pasien, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya yang mendukung pelayanan tersebut. adanya batasan biaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan, dan banyaknya pasien yang harus menjalani rawat inap tidak sebanding dengan ketersediaan ruang rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah surakarta hal hal tersebut mengakibatkan pelayanan yang di berikan kepada peserta bpjs kesehatan menjadi tidak optimal

Ketiga upaya yang dilakukan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yaitu seperti pemasangan bagan alur pemeriksaan di tempat yang terlihat dan mudah di baca oleh pasien peserta BPJS Kesehatan, melakukan rujukan ke rumah sakit lain yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan PMK No 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan

Kesehatan Perorangan, mengadakan dokter pengendali mutu dan biaya sesuai dengan pasal 80 Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan mengganti kelas yang dimiliki oleh peserta BPJS Kesehatan ke kelas yang memiliki ketersediaan kamar atau melakukan rujukan ke rumah sakit lain yang memiliki ketersediaan kamar yang sesuai dengan kelas yang dimiliki oleh pasien peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan pasal 61 Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal

4.2 Saran

Pertama perlu adanya sosialisasi yang dilakukan mengenai program pelayanan kesehatan baik dari pihak BPJS Kesehatan maupun Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sendiri sehingga peserta BPJS dapat memperoleh manfaat dari program pelayanan kesehatan sesuai dengan hak-haknya dengan melalui prosedur yang benar.

Kedua Perlu adanya peninjauan kembali terkait perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dengan BPJS Kesehatan khususnya tentang penyediaan pelayanan jenazah yang merupakan salah satu hak peserta BPJS kesehatan dan diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan dan PMK No 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional

Ketiga Untuk Rumah Sakit Muhammadiyah agar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang di berikan kepada pasien terutama peserta BPJS Kesehatan diantaranya ketersediaan sarana , prasana dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara maksimal dengan begitu pasien bisa merasakan manfaat dari program pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan

PERSANTUNAN

Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang selalu sabar dalam membesarkan dan mendidik penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kepada keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima

kasih telah memberi indah warna hidup. Kepada pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Kepada teman-teman semua dari berbagai kalangan yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia , *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional*,

Putri Nora Eka, 2014, *Efektifitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di kota padang* , jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Mongi Jeane, 2015 *Implementasi Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Angkatan Darat Robert Wolter Mongosidi Manado*, jurnal Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi,

Muninjaya, A.A.Gede, 2004, *Manajemen Kesehatan, Kedokteran*, Jakarta ,EGC